

Bab V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitaian yang telah dilakukan di lapangan dan dianalisis pada bab terdahulu, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Renstra dalam Penyusunan Program dan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Faktor Proses

a. Ketajaman Indikator

Ketajaman indikator pada indikator program “Persentase tingkat pemahaman” dan “Menurunnya jumlah konflik social” masing-masing perlu adanya perbaikan baik dari sisi devinisi operasional dan *tool/* kuesioner yang digunakan pada saat pelaksanaan sosialisasi pemahaman pada masyarakat. Sedangkan untuk indikator “Menurunnya jumlah konflik social” devinisi operasionalnya menurunnya Kejadian Konflik di Masyarakat, walaupun capaiannya 100% namun belum mencerminkan kualitas yang diharapkan menurunnya Kejadian Konflik di masyarakat.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sangat penting, berdasarkan pembahasan diatas pada faktor sumber daya manusia terkait

kompetensi pegawai dari segi perencanaan dalam implementasi Renstra belum sepenuhnya memahami sehingga perlu ada peningkatan kompetensi.

c. Komitmen

Komitmen dalam implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran sangat dibutuhkan untuk mencapai komitmen kerja yang baik, seperti apa yang sudah dijelaskan diatas yaitu salah satunya dengan adanya perjanjian kinerja, capaian perjanjian kinerja yang baik dari mulai eselon II, eselon III, eselon IV, staf pelaksana jabatan fungsional akan maksimal dan didukung dengan adanya komunikasi yang baik antara implementator perencanaan, pelaksana. Komitmen kerja, tanggung jawab, Efikasi diri merupakan keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu perlu ditingkatkan agar implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran dapat terwujud dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Faktor ini membahas dari sisi birokrasi yang berpengaruh terhadap implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, terkait Kebijakan Pemerintah Pusat sangat berpengaruh pada implementasi Renstra pada penyusunan program dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Selain itu birokrasi dari proses implementasi Renstra dan Penyusunan dan anggaran yang masih terdapat kendala teknis

dalam penyusunan anggaran. Kendala ini erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia dan Komunikasi. Pengaruh struktur birokrasi dalam implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran dilihat dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam alur birokrasi sangat signifikan pengaruhnya, keberadaan struktur organisasi yang memadai menjadi acuan atau dasar pembagian tanggungjawab berdasarkan tugas dan fungsi struktur birokrasi yang sudah ada dan ditetapkan.

2. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi disini terkait komunikasi antar perencana, pelaksana, dan stake holder juga faktor dukungan dari teknologi dan informasi, hal ini sangat penting dan berpengaruh besar dalam suksesnya implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Komunikasi berperan sebagai penggerak untuk empat faktor lainnya, yaitu ketajaman indikator, sumberdaya manusia, komitmen, dan struktur birokrasi dengan adanya komunikasi yang baik dan diimplementasikan pada masing-masing faktor harapannya implementasi Renstra ini berjalan secara maksimal.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk lebih mengoptimalkan implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Proses

a. Ketajaman Indikator

Ketajaman indikator pada indikator program “Persentase tingkat pemahaman” dan “Menurunnya jumlah konflik social” masing-masing perlu adanya perbaikan baik dari sisi devinisi operasional dan *tool* kuesioner yang digunakan pada saat pelaksanaan sosialisasi pemahaman pada masyarakat yang selama ini hanya satu kali kuesioner hendaknya agar lebih mencerminkan tingkat pemahaman peserta diberikan kuesioner pretest dan post test sehingga tingkat pemahaman peserta dapat diukur lebih baik.

Sedangkan untuk indikator “Menurunnya jumlah konflik social” devinisi operasionalnya menurunnya Kejadian Konflik di Masyarakat, walaupun capaiannya 100% namun belum mencerminkan kualitas yang diharapkan menurunnya Kejadian Konflik di Masyarakat seharusnya kualitas yang baik adalah jika realisasi lebih rendah dari target, jadi tidak hanya focus pada angka target yang tercapai namun harus berfikir bagaimana caranya agar realisasi jumlah konflik social menurun dari kondisi yang ada.

b. Sumber Daya

Pada sumber daya manusia perlu adanya peningkatan kompetensi dalam hal perencanaan melalui beberapa cara antara lain bimbingan teknis, diklat, pelatihan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta kemudahan akses informasi melalui website terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, tugas dan fungsi, serta hal-hal lain yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi DKI Jakarta. Peran komunikasi dalam hal peningkatan kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh dalam pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pembahasan implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran antara implementator perencana, pelaksana, dan stake holder terkait.

c. Komitmen

Komitmen kerja dan tanggungjawab pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta harus lebih ditingkatkan agar lebih berorientasi pada kinerja organisasi sehingga dengan komitmen yang tinggi implementasi Renstra dapat tercapai secara maksimal.

d. Struktur Birokrasi

Dari sisi struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, terkait kebijakan-kebijakan Pemerintah baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah termasuk juga dengan kebijakan birokrasi dalam perencanaan program kegiatan, yaitu kebijakan yang sudah dibuat agar sesuai jadwal dalam implementasinya jadi para perencana dan pelaksana bisa tepat waktu dalam penyusunan program dan anggaran.

2. Faktor Komunikasi

Untuk faktor komunikasi sebagai penggerak bagi faktor lainnya disini terkait komunikasi antar perencana, pelaksana, dan *stakeholder*

juga faktor dukungan dari teknologi dan informasi, hal yang sebaiknya perlu dilakukan peningkatan antara lain adalah:

- a. Komunikasi dua arah antara perencana dengan pelaksana juga *stakeholder* yang berkaitan dengan implementasi Renstra ini ditingkatkan, agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- b. Untuk dukungan teknologi informasi pada implementasi Renstra dalam penyusunan anggaran perlu dukungan internet yang stabil agar pada saat proses perencanaan program input Renstra pada sistem informasi perencanaan jangka menengah (SIPJM) dapat lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, F. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi (I)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Assauri, S. (2016). *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages* (S. Rachmi Fitri Assauri, M. dr. S. Faradilla Assauri, M. E. Nasution, & S. Doddy Nurhasman (eds.); II). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Borick, Shafritz, & R. (2013). *Introducing Public Administration* (S. Chaisson (ed.); IX). PEARSON.
- Erwin Zubair Gobel, Y. P. Koton. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Deepublish, Yogyakarta.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.)). Widya Karya.
- Jones, G. R. (2010). *Organization Theory Design and Change* (VI). Global Edition.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan (I)*. Graha Ilmu.
- Moeheriono. (2012). *Indikator Kinerja Utama (IKU) (II)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert Kreitner, A. K. (2014). *Perilaku Organisasi* (Rosidah (ed.); IX). Salemba Empat.
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Utomo, W. (2012). *Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik (IV)*. Pustaka Pelajar.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)). Paragonatama Jaya.

Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Penelitian* (L. Alfiah (ed.); I).

B. Jurnal

Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.

Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24.

Anggraini, D. (2013). Pengembangan Kompetensi Aparatur Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda (Studi Evaluasi Keputusan Kepala BAdan Kepegawaian Negara No 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 999–1008.

Dina Maulida, Rita Kalalinggi, & L. D. (2018). Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan (BAPELITBANG) Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Tata Ruang Di Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 399–410.

Haerul, Haedar Akib, & H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).

Iva, M. I. N. (2015). *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kota Makassar*. 1(2).

Lubis, E. F. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) (Studi Kasus : Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA*, 1(2), 304–317.

- Musa, M. I. (2013). Pengaruh Implementasi Model Kebijakan Dana Kompensasi Bbm Terhadap Mutu Layanan Kesehatan Keluarga Miskin Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Economix*, 1(1), 51–72.
- Nasution, M. S. (2015). *Urgensi Perencanaan Stratejik Bagi Peningkatan Kinerja Lembaga Diklat*. 6(2–3).
- Ofori, D. (2012). Strategic Planning in Public Universities A Developing Country Perspective. *Journal of Management and Strategy*, 3(1), 67–82. <https://doi.org/10.5430/jms.v3n1p67>
- Silvia Ningsih, Afridian Wirahadi, & A. F. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(1), 1–16.
- Syahrul. (2017). Perencanaan Strategis dan Praktiknya di Perguruan Tinggi. *Shautut Tarbiyah*, 36(XXIII), 1–18.
- Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). *Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. 7(3), 4017–4025.
- Tuasikal, A. (2015). Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 78. <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1266>
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(2), 99–103.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Ali, F. (2011). *Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik*

- Menuju Redefinisi* (I). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24.
- Anggraini, D. (2013). Pengembangan Kompetensi Aparatur Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda (Studi Evaluasi Keputusan Kepala BAdan Kepegawaian Negara No 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 999–1008.
- Assauri, S. (2016). *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages* (S. Rachmi Fitri Assauri, M. dr. S. Faradilla Assauri, M. E. Nasution, & S. Doddy Nurhasman (eds.); II). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Borick, Shafritz, & R. (2013). *Introducing Public Administration* (S. Chaisson (ed.); IX). PEARSON.
- Dina Maulida, Rita Kalalinggi, & L. D. (2018). Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan (BAPELITBANG) Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Tata Ruang Di Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 399–410.
- Drajat Kartono, & hanif Nurcholis. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, 1–52.
- Erwin Zubair Gobel, Y. P. koton. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Deepublish, Yogyakarta.
- Haerul, Haedar Akib, & H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (ed.)). Widya Karya.
- Iva, M. I. N. (2015). *Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kota Makassar*. 1(2).

- Jones, G. R. (2010). *Organization Theory Design and Change* (VI). Global Edition.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan* (I). Graha Ilmu.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPD) (Studi Kasus : Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA*, 1(2), 304–317.
- Moeheriono. (2012). *Indikator Kinerja Utama (IKU)* (II). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Musa, M. I. (2013). Pengaruh Implementasi Model Kebijakan Dana Kompensasi Bbm Terhadap Mutu Layanan Kesehatan Keluarga Miskin Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Economix*, 1(1), 51–72.
- Nasution, M. S. (2015). *Urgensi Perencanaan Strategik Bagi Peningkatan Kinerja Lembaga Diklat*. 6(2–3).
- Ofori, D. (2012). Strategic Planning in Public Universities A Developing Country Perspective. *Journal of Management and Strategy*, 3(1), 67–82.
<https://doi.org/10.5430/jms.v3n1p67>
- Robert Kreitner, A. K. (2014). *Perilaku Organisasi* (Rosidah (ed.); IX). Salemba Empat.
- Silvia Ningsih, Afridian Wirahadi, & A. F. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 13(1), 1–16.
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Syahrul. (2017). Perencanaan Strategis dan Praktiknya di Perguruan Tinggi. *Shautut Tarbiyah*, 36(XXIII), 1–18.
- Triyono, N., Kalangi, L., & Alexander, S. (2019). *Evaluasi Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. 7(3), 4017–4025.
- Tuasikal, A. (2015). Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 78. <https://doi.org/10.19184/jauj.v11i2.1266>
- Utomo, W. (2012). *Administrasi Publik Baru Indonesia Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik* (IV). Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)). Paragonatama Jaya.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(2), 99–103.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Penelitian* (L. Alfiah (ed.); I).
- Zahra, A., & Dosen. (2014). *Politik, Strategi Dan Pengaruh Manajemen Dalam Evaluasi Kinerja*. 2(01), 1–13.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 258 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD/UKPD

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PEDOMAN WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDELINES)

Bapak/Ibu yang kami hormati, perkenankan saya, Lia Ladatul Aliyah, mahasiswi Program Magister Ilmu Administrasi Manajemen Pembangunan Daerah POLITEKNIK STIA LAN Jakarta, untuk melakukan wawancara dengan bapak/ibu. Saya akan mewawancarai bapak/ibu sebagai responden untuk penulisan tesis saya yang berjudul: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA”**.

Wawancara ini bersifat personal. Data dan informasi yang bapak/ibu sampaikan, akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penulisan tesis saya, dan tidak akan digunakan untuk kepentingan yang lain. Saya bertanggungjawab penuh atas kerahasiaan informasi dan data yang bapak/ibu sampaikan.

Olehnya, saya mohon bantuan dan kesediaan dari bapak/ibu untuk menjawab pertanyaan saya dengan jujur atau apa adanya, sehingga data hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta pada masa-masa yang akan datang.

Terima kasih atas bantuan dan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden penelitian ini.

Data Pribadi Responden

Nama : _____
Umur : _____
Pendidikan Akhir : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

Keterangan Pewawancara

Tanggal Wawancara : _____
Tempat Wawancara : _____

Lama Waktu Wawancara : _____

Identitas Responden 1

Nama : Entis Sutisna, S.IP, M.Si
Umur : 55
Pendidikan Akhir : S2
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan : Sekretaris Badan
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :
Lama Waktu Wawancara :

Identitas Responden 2

Nama : Wahyu Apriyanto, S.IP
Umur : 36
Pendidikan Akhir : S1
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :
Lama Waktu Wawancara :

Identitas Responden 3

Nama : Enylita Loysa Br Tobing, SE
Umur : 50
Pendidikan Akhir : S1
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :
Lama Waktu Wawancara :

Identitas Responden 4

Nama : Yusniawati, S.Sos
Umur : 47
Pendidikan Akhir : S1
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan : Pengelola Perencanaan dan Anggaran
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :
Lama Waktu Wawancara :

Identitas Responden 5

Nama : Rahmi Meilani, S.IP
Umur : 41
Pendidikan Akhir : S1
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jabatan : Analis Pendidikan Budaya Politik
Tanggal Wawancara :
Tempat Wawancara :
Lama Waktu Wawancara :

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PASCA SARJANA
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
TAHUN 2021**

JUDUL PENELITIAN

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI RENCANA
STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA**

PENGANTAR

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi Sebagian tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Program Pasca Sarjana Politeknik STIA LAN Jakarta

Demi tercapainya tugas ini, dimohon dengan hormat key informant berkenan untuk dapat membantu dengan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan, tidak ada maksud lain dalam penelitian ini terkecuali hanya untuk menyumbangkan ilmu semata.

Adapun bantuan dan kesediaan untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara ini kami ucapkan terimakasih.

Hormat saya,
Lia Ladatul Aliyah

PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMANT

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA

A. FAKTOR PROSES

1. Ketajaman Indikator

- a. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu implementasi Renstra pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sudah yang diharapkan?
- b. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu implementasi Renstra pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sudah mencerminkan ketajaman indikator yang menekankan pada outcome atau hasil?
- c. Kendala apa saja yang menyebabkan implementasi Renstra belum tujuan yang diharapkan?
- d. Faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan implementasi Renstra dalam mencapai tujuannya?

2. Sumber Daya

- a. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu kapasitas dan kompetensi SDM pelaksana dan perencana dalam implementasi Renstra pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta?
- b. Saran dan Solusi untuk perbaikan untuk keberhasilan tujuan mplementasi Renstra?

3. Komitmen

- a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu menciptakan komitmen diorganisasi yang dapat menimbulkan inspirasi mengenai cara terbaik untuk keberhasilan implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta?

- b. Apa saran dan Solusi Bapak/Ibu untuk meningkatkan komitmen organisasi agar keberhasilan implementasi Renstra dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan?
4. Struktur Birokrasi
 - a. Bagaimana menurut Bapak/Ibu struktur birokrasi berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi Renstra dalam penyusunan program dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta?

B. FAKTOR KOMUNIKASI

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu komunikasi antara pelaksana, perencana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 54 Provinsi DKI Jakarta dan stake holder dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat faktor komunikasi tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan komunikasi berhasil dalam hal implemetasi Renstra?
4. Solusi yang sebaiknya dilakukan untuk perbaikan komunikasi dalam implemetasi Renstra?

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

TRANSKIP WAWANCARA

RESPONDEN 1

PERTANYAAN (NO)	HASIL WAWANCARA
A. FAKTOR PROSES 1. Ketajaman Indikator 2. Sumber Daya 3. Komitmen 4. Struktur Birokrasi	
1.a	Terkait dengan rencana strategis badan kesbangpol bawa Renstra dibidang kesbang sudah dimuat dari selama lima tahunan yang setiap lima tahunan itu diimplementasikan dalam tahunan dan tahunan itu dikerjakan oleh badan kesbang sesuai dengan target capaian kinerja bahwa Renstra badan kesbang sudah dikoordinasikan oleh Bappeda dan di template mulai dari kegiatannya mulai dari tingkat provinsi dan kota Sehingga dalam pengukuran nya kita dapat memudahkan untuk melihat apakah rencana strategis badan kesbang sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan secara organisasi dan sampai saat ini bahwa renstra badan Badan kesbang sudah mencapai apa yang diharapkan dan rata-rata capaiannya di atas 90% untuk itu maka rencana strategis badan kesbang yang diharapkan kedepannya adalah agar kita lebih mengikuti jaman dengan mengedepankan teknologi informasi karena dalam situasi sekarang yang saat ini pandemi sehingga kedepannya kita harus merancang bahwa renstra itu selain melalui pendekatan yang tadi yaitu melalui

	pendekatan ke masyarakat yang seperti biasa kita juga melalui pendekatan melalui teknologi informasi.
1.b	Renstra kita pertama terkait dengan pengembangan demokrasi yang dijabarkan pengukurannya melalui alat yang disebut indeks demokrasi Indonesia ketajaman indikatornya sudah bagus dan implementasinya bahwa DKI secara berturut-turut menjadi predikat pertama terkait dengan pengembangan demokrasi Indonesia di seluruh Indonesia yaitu indeks demokrasi Indonesia yang selanjutnya terkait dengan ketajaman di kantor masih di pengembangan demokrasi terkait dengan tingkat pemahaman tingkat pemahaman di DKI Jakarta yang diuji melalui kegiatan dan kita diuji juga melalui penyebaran kuesioner bahwa tingkat ketajaman atau pemahaman masyarakat cukup menggembirakan namun ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki yang pertama bahwa masih ada masyarakat yang masih menjawab mempersepsikan jawabannya terkait dengan indikator pemahaman itu masih ada yang menyatakan cukup ini yang menjadi PR kita kedepannya agar tingkat pemahaman ini perlu ditingkatkan lebih bagus lagi.
1.c	kendalanya terkait dengan anggaran untuk tahun ini karena apa Karena capaian kita akan selalu berkorelasi dengan anggaran dan untuk tahun ini anggaran kita memang kena refocusing itu kena efisiensi sehingga capaian-capaian target kita yang sudah direncanakan di reschedule ulang sehingga capaian nya belum mencapai secara maksimal.
1.d	Faktor pendukungnya Mungkin kita di internal maupun eksternal di internal bahwa faktor pendukungnya sudah pasti adalah SDM badan kesbang secara keseluruhan bahwa SDM badan kesbang sangat mendukung dalam implementasi renstra yang kedua yang internal dukungan

	anggaran juga sangat cukup ketiga dukungan kebijakan juga sudah lengkap bahwa dikita dukungan-dukkungan dalam rangka untuk implementasi Renstra itu melalui kebijakan-kebijakan sudah sangat mendukung dan pendukung keberhasilan tingkat masyarakat mulai dari forum-forum di kita ada FKUB, FKDM, FPK, KOMINDA, TTW PKS maupun tim ketahanan ekonomi DKI Jakarta sangat mendukung dalam rangka pencapaian implementasi Renstra dalam mewujudkan pembangunan kesatuan bangsa di DKI Jakarta
2.a	Kalo segi SDM memang variative dari sisi perencanaan mungkin SDM kita sudah sesuai dengan yang diharapkan tapi dalam implementasi Renstra baik di bidang maupun di tingkat wilayah ada yang sudah cukup ada yang perlu untuk dilakukan peningkatan-peningkatan melalui pendidikan maupun pelatihan mungkin untuk secara keseluruhan bahwa di tingkat perencanaan SDM nya sudah cukup mungkin di tingkat implementasi masih ada yang perlu untuk ditingkatkan.
2.b	Pertama bahwa masih perlu peningkatan SDM bahwa memang SDM itu setiap hari perkembangan itu selalu dinamis sehingga SDM juga perlu untuk dilakukan peningkatan baik melalui pelatihan Diklat maupun hal-hal sejenisnya yang kedua perbaikan mulai dengan sistem dari karena kedepannya kita akan berpacu dengan 4.0 terkait dengan IT bahwa kita harus berpacu dengan teknologi yaitu teknologi IT yang selanjutnya mungkin untuk perbaikannya bahwa Renstra badan kesbang ini perlu ada kebijakan koordinasi yang mengikat antar SKPD sehingga pelaksanaan salah satu umpamanya terkait dengan penanganan konflik tidak bisa diselesaikan oleh kesbang tapi dapat dukungan dari instansi terkait.

3.a	Baik terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam implementasi Renstra badan kesbang sangat mendukung dalam artian bahwa capaian-capaian yang dilaksanakan oleh Renstra didukung juga oleh kebijakan-kebijakan pusat seperti umumnya dalam rangka penanganan perkembangan demokrasi di dukung dengan indeks demokrasi Indonesia terkait dengan penanganan penanganan konflik ada tim yaitu tim penanganan konflik sosial yang didukung oleh kebijakan Permendagri dari pusat yang selanjutnya terkait dengan penanganan potensi kerawanan sosial ada indeks potensi kerawanan sosial terkait dengan perkembangan deteksi dini, kerukunan sosial maupun toleransi dan kehidupan wawasan kebangsaan kita didukung dengan dimunculkannya Permendagri agar daerah membentuk sidang pertama tentang membentuk FKDM, FKUB, PPWK dan membentuk FPK Oleh karena itu bahwa kebijakan pusat sangat pengaruh dalam beberapa kegiatan yang sangat strategis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.b	Solusinya untuk perbaikan komunikasi bahwa tadi perbaikan komunikasi perencanaan pelaksanaan yaitu melalui sinkronisasi yang kedua komitmen yang ketiga terkait dengan perbaikan komunikasi kebijakannya. untuk yang komitmen tadi menurut Bapak perlu adanya panismen/reward tidak Kalau komitmen aja kan biasanya yasudah komitmen gimana gitu cara mewujudkannya perlu tidak, apakah seperti kebijakan kalau tidak tercapai ke TTP atau gimana?? Memang DKI sudah membuat system adanya panismen/reward untuk capaian yang bagus sehingga reward TPP nya bisa 100% panismennya tatkala dia tidak mencapai apa yang telah ditargetkan yaitu panismen tadi TTP nya pasti tidak akan mencapai

	100% bahwa memang komitmen ini sudah dijabarkan dan harus di laksanakan itu terkait dengan panisemen/reward.
4.a	Terkait dengan struktur birokrasi memang sangat berpengaruh dalam rangka implementasi Renstra mulai dari kebijakan-kebijakan Pak Gubernur yang terus dikoordinasikan oleh Bappeda yang selanjutnya oleh instruksi arahan dari kepala Badan yang selanjutnya diimplementasikan di tingkat bawahnya Melalui rapat teknis dalam rangka rakernis rapat kerja teknis di mana seluruh perangkat kesbang mulai dari secretariat, bidang, wilayah menyusun terkait dengan rencana strategis dimaksud penyusunan-penyusunan program dan kegiatannya agar implementasi Renstra sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh karena itu bahwa struktur mulai dari rapat kerja teknis kebijakan-kebijakan Pemprov melalui Bappeda maupun dengan kebijakan-kebijakan Gubernur sangat mendukung sekali sehingga capaian Renstra badan kesbang itu sangat tergantung dengan struktur yang telah dilaksanakan
B. FAKTOR KOMUNIKASI	
1	Yang pertama awal penyusunan Renstra itu kita koordinasikan oleh Bappeda kadang kala kita membahas yang disampaikan dari Bappeda dengan didampingi oleh narasumber saat pelaksanaan koordinasi pengarahannya dari Bappeda melalui Narasumber itu saat pelaksanaan dengan implementasi dikemudian harinya kadang suka berubah ada beberapa hal yang berubah umpamanya kegiatan Program a indikatornya 2 ternyata pas kedepannya indikatornya dirubah lagi itulah yang menjadi agak komunikasi kita dengan teman-teman bidang dan wilayah agak terhambat yang kedua teman-teman di bidang maupun di wilayah penjabaran pelaksanaan

	kegiatan kadang tidak mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan umpamanya kita punya target capaian setahun itu 20.000 atau perbidang umpamanya 2.000 dia tidak mengejar target itu sehingga tatkala kita ditanyakan tentang realisasi penyerapan itu tidak tercapai sehingga agar berpengaruh sedikit kepada capaian indikator sehingga berkonsekuensi kurangnya TPP secara maksimal
2	TI Saya sudah jelaskan tadi kedepannya bahwa 4.0 itu menjadi salah satu alternatif dalam rangka pelayanan elektronik pemerintah dalam artian bahwa teknologi ini sangat mendukung capaian-capaian yang ada di SKPD khususnya di badan kesbang kendalanya bahwa umpamanya contoh sekarang kita menyusun Renstra kendalanya Renstra belum jadi sudah diminta untuk diinput tatkala renstra ini kita selesaikan ternyata tidak bisa diperbaiki karena sistemnya tidak dibuka itu yang menjadi kendala sehingga tatkala kita mengimplementasikan ke target-target yang ada di Renstra yang sudah jadi tidak bisa tercapai Karena yang dilihat oleh Bappeda adalah Renstra yang masih draf belum diperbaiki
3	Memang pertama mungkin perlu kita konsistensi dalam penggunaan teknologi informasi dalam artian bahwa teknologi informasi ini perlu untuk untuk dikomunikasikan ke SKPD-SKPD termasuk dengan kesbang sehingga tatkala ada perubahan-perubahan kebijakan yang ada di kita kesbang khususnya bisa langsung diinput ke dalam sistem yang kedua terkait dengan komunikasi pelaksanaan perencanaan memang perlu komunikasi sama juga harus ada konsistensi sehingga baik komunikasi perencanaan di tingkat Bappeda sampai ke

	tingkat kita ke kesbang, bidang sampai ke tingkat wilayah menjadi sinkron kuncinya adalah konsistensi
4	Factor yang membuat komunikasi berhasil yaitu komitmen memang kalau seluruhnya baik tingkat jajaran paling puncak Bappeda kita di SKPD kesbang mulai dari secretariat, bidang, sampai dengan tingkat wilayah memang komitmen-komitmen dalam dalam rangka melaksanakan rencana strategis yang telah kita tetapkan umpamanya contoh kita akan melaksanakan capaian target setahun 20.000 ribu kepada masyarakat itu menjadi komitmen kita bagaimana upayanya agar target itu bisa tercapai jadi yang intinya bahwa keberhasilan Komunikasi itu komitmen. Bagaimana jika saat pembahasan ditengah jalan Renstra pengusulannya anggaran dan target udah sesuai tapi pada saat pembahasan di kawal PPAS di banggar anggaran dikurangin karena faktor-faktor dana tidak mencukupi atau anggaran tidak mencukupi itu sebaiknya solusinya gimana pak agar target kita tuh tercapai? Solusinya memang kita ini kan punya jajaran kemitraan mulai dari ada punya ormas kita punya forum-forum punya tokoh-tokoh yang bisa digerakkan oleh kita dalam artian bahwa tetap Walaupun anggarannya ada kena pengurangan tetapi kita menggunakan jalur jalur samping sehingga capaian target itu bisa dilaksanakan.

RESPONDEN 2

PERTANYAAN (NO)	HASIL WAWANCARA
A. FAKTOR PROSES 1. Ketajaman Indikator 2. Sumber Daya	

3. Komitmen 4. Struktur Birokrasi	
1.a	Terkait implementasi Renstra pada badan Kesbangpol DKI Jakarta memang ada berapa hal yang sudah sesuai kita harapkan implementasi Renstra itu sendiri merupakan sasaran 5 tahunan dari yang merupakan turunan dari visi misi gubernur yang diturunkan ke dalam masing-masing SKPD sehingga apa yang dijalankan oleh masing-masing SKPD terkait Renstra kemudian turunnya ke Renja yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD kesbangpol ada yang sudah berjalan sesuai harapan kemudian ada juga yang mungkin perlu perbaikan terkait mengacu pada Renstra mungkin ada beberapa kegiatan yang perlu kita luruskan lagi kita selaraskan lagi terkait Renstra yang sesuai visi misi gubernur.
1.b	Untuk di kesbangpol sendiri ini dari sejak saya mengenal kesbangpol dan berapa kali diskusi dengan Bappeda maupun ditingkat lain subanpeko kesbangpol ini merupakan salah satu dinas yang “indikatornya agak susah diukur karena non fisik okelah kalo kita misalnya berbicara masalah pembangunan bangunan gedung oke jelas udah jelas hasilnya apa tapi kalo ngomong Kesbangpol akun dinas lain yang dinas sosial kesbangpol ini indikatornya seperti apa yang agak susah mencerminkan kan yang sering terjadi adalah hanya lebih menekankan kepada output, outcomenya masih kurang jadi kalau ketika indikator kita coba susun Renstranya indikator Kesbangpol seperti apa kita coba menyusun misalnya meningkatnya pemahaman masyarakat kemudian turunannya seperti apa sih untuk mengukur pemahaman yang diberikan ke masyarakat seperti apa itu yang agak susah diukur ketajaman indikatornya berbeda

	dengan dinas yang pembangunannya memang secara fisik mungkin kalau menurut saya sih memang perlu diperjelas secara Hitam putih juga tidak bisa karena memang dari ruang lingkup yang lebih sosial bukan yang pakai teknik bahan baku tapi tetap kita harus berusaha mewujudkan bahwa indikator itu harus disusun dan ditentukan memang harus tercapai ini kegiatan hasilnya apa bukan hanya angka tapi juga outcome
1.c	Kalo saya belum lama di subag perencanaan anggaran tapi kalau yang saya lihat selama ini sejak dari di wilayah kemudian di provinsi ketika implementasi Renstra Kesbangpol yang belum diharapkan balik lagi ke yang tadi pertama disasaran targetnya yang kedua seringnya bidang-bidang atau pelaksana maupun yang di wilayah itu hanya sifatnya pengulangan apa yang ada terkadang mereka tidak melihat Renstranya apa sih bahwa Renstra punya target 5 tahunan tapi yang terjadi adalah mereka sifatnya pengulangan kegiatan seperti pengulangan kegiatan ini sama seperti tahun lalu sebenarnya ada target yang harus dicapai di Renstra ini menurut saya seperti itu jadi tujuan yang diharapkan itu mungkin jadi kurang tercapai jadi kendalanya mungkin kurangnya sosialisasi jadi harusnya tahu sosialisasi terkait renstra itu sendiri. Pertama itu sosialisasi yang kedua yang namanya Renstra itu 5 tahunan gubernur berarti kan ada pemahaman dari masing-masing pihak tidak hanya di bidang sekretariat atau perencanaan anggaran tidak seperti itu namanya Renstra keseluruhan badan kesbangpol semua harus memahami sampai ke tingkat wilayah karena Renstra 5 tahunan bukan hal yang ada barang baru Renstra kita kasih lalu kita bilang belum paham tidak bisa seperti itu dan ini sifatnya sudah berapa tahun yang lalu gubernur saja sudah mau pemilihan lagi

1.d	Yang pertama dari penyusunannya sdm-nya kemudian bagaimana pelaksanaannya di masing-masing bidang implementasinya Ketika SDM penyusunnya baik di penghubung di bidang maupun di suku badan wilayah tidak memahami Renstra yang merupakan turunan visi misi gubernur ini mau dibawa kemana target dalam jangka waktu 5 tahun ke depan jadinya keberhasilan itu akan berkurang itu satu, yang ke kedua bagaimana inovasi SDM untuk mewujudkan implementasi Renstra sebagai contoh tahun lalu anggaran kita di refocusing tapi Renstra tidak mungkin di refocusing anggaran di refocusing tapi target tidak bisa diturunkan jadi bagaimana SDM masing-masing yang sudah memahami Renstra tau ketika tidak ada anggaran bagaimana mewujudkan target yang sudah disahkan dengan inovasi-inovasi lain.
2.a	Yang pertama dari penyusunannya sdm-nya kemudian bagaimana pelaksanaannya di masing-masing bidang implementasinya Ketika SDM penyusunnya baik di penghubung di bidang maupun di suku badan wilayah tidak memahami Renstra yang merupakan turunan visi misi gubernur ini mau dibawa kemana target dalam jangka waktu 5 tahun ke depan jadinya keberhasilan itu akan berkurang itu satu, yang ke kedua bagaimana inovasi SDM untuk mewujudkan implementasi Renstra sebagai contoh tahun lalu anggaran kita di refocusing tapi Renstra tidak mungkin di refocusing anggaran di refocusing tapi target tidak bisa diturunkan jadi bagaimana SDM masing-masing yang sudah memahami Renstra tau ketika tidak ada anggaran bagaimana mewujudkan target yang sudah disahkan dengan inovasi-inovasi lain.
2.b	Satu hal untuk yang perbaikan SDM ada diklat saya setuju bahwa diklat MPPD tidak hanya dikhususkan untuk subag perencanaan dan anggaran baik kasubagnya

	maupun staf tapi juga harus melibatkan bidang dan suku badan wilayah karena disuku badan wilayah penyusunan anggaran terhadap mereka sendiri bukan nginduk ke provinsi. Provinsi hanya mengakomodir kita mengkoordinir jadi diwilayah juga harus ada masing-masing yang sudah mengikuti diklat MPPD yang kedua saran perbaikannya adalah mereka harus sadar dan mau dilibatkan ketika ada dalam hal penyusunan Renstra berarti kesadaran komitmennya jadi ketika ini lho untuk kesbang bukannya berfikir Renstra itu hanya untuk sekretariat bukan seperti itu karena penyusunannya adalah keseluruhan
3.a	Terkait campur tangan atau kepercayaan pusat terhadap implementasi Renstra pada badan Kesbangpol seperti kita tahu bahwa Renstra itu merupakan turunan dari visi misi Gubernur diturunkan kemudian juga ini terkait dengan RPJMD terkait juga RPJMD yang 5 tahun itu terkait juga dengan RCPD 25 tahunan dan harus sinkron dengan RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang 25 tahun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga tentunya koridor pembangunan di Indonesia tidak lepas atau tidak melenceng dari apa yang ditetapkan dalam RPJP tersebut dari situ saja sudah terlihat bahwa ada pengaruh dari pemerintah pusat terhadap penyusunan Renstra di masing-masing SKPD khususnya di badan kesbangpol Kemudian yang kedua ada juga kebijakan mengenai SDGs atau Sustainable Development Goals yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan dari Bank Dunia yang diturunkan dan diterapkan di pemerintah Indonesia yang akhirnya diterapkan juga di masing-masing pemerintahan daerah yang terakhir yang tak kalah penting juga bahwa kita di pemerintah daerah ini pasti terkait dengan aturan-aturan

	di Kementerian pusat bisa dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri seperti aturan yang terakhir yaitu adanya Permendagri 90 tentunya merubah berpengaruh pada mplementasi Renstra yang ada di badan Kesbangpol sampai akhirnya Renstra periode 2017-2022 ini ada perubahan jadi seperti revisi Renstra yang seharusnya Namanya Renstra itu 5 tahunan karena sekarang ada Peraturan Menteri Dalam Negeri jadinya mengikuti ada perubahan Renstra jadi kita tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah pusat jadi kita harus mengacu ke pemerintah pusat begitupun juga harus mengakomodir visi misi gubernur dan juga aspirasi masyarakat seperti itu jadi memang tidak bisa terlepas karena memang kita pemerintah daerah merupakan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia tetap harus ada terkait dengan RPJP di atas
3.b	Perbaikan komunikasi seperti yang sudah saya udah sampaikan bahwa mungkin untuk teknologi informasinya perlu peningkatan baik di jaringan internet maupun di Hardwarenya yang kedua solusinya yang terkait komunikasi harus masing-masing internal kesbang punya kesadaran terkait bagaimana penyusunan implementasi Renstra. Renstra itu bukan hanya milik satu bidang secretariat tapi Renstra itu untuk keseluruhan bidang samapi ke suban suku badan dan itu juga yang mempedomani bahwa badan Kesbangpol untuk bergerak bagaimana targetnya ke badan Kesbangpol semua ada di Renstra jadi semua tuh harus punya kesadaran Renstra itu kita semua bukan hanya satu bagian.
4.a	Struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi Renstra penyusunan program dan anggaran saya rasa itu cukup berpengaruh Karena bagaimanapun juga dalam struktur birokrasi seharusnya atau idealnya ketika dalam

	penyusunan Renstra yang merupakan acuan SKPD dalam penyusunan program dan anggaran demokrasi atau pimpinan harus memberikan pendampingan dan juga memberikan arahan ketika penyusun program anggaran itu tidak melenceng dari Renstra yang sudah diterapkan jadi menurut saya struktur birokrasi harus cukup berpengaruh dalam penyusunan
B. FAKTOR KOMUNIKASI	
1	Menurut saya komunikasi antara pelaksanaan perencanaan dan stakeholder di badan Kesbangpol rasanya sudah berjalan cukup baik selama ini baik saya dan tim di subag perencanaan anggaran selalu menjalin komunikasi baik dengan internal di bakesbangpol dengan para penghubung maupun dengan suku badan kota administrasi kesbangpol maupun juga dengan stakeholder terkait dengan Bappeda ataupun BPKB harapannya agar pelaksanaan maupun implementasi Renstra yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik selain itu juga kami dari sebuah perencanaan dan anggaran juga tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan bahkan ketika di awal tahun juga selalu kami mengundang para perwakilan bidang maupun dari kota administrasi kesbangpol untuk hadir dalam sosialisasi terkait Renstra disitu kami juga mengingatkan Renstranya Kesbangpol seperti apa dan target apa yang harus dicapai
2	Teknologi informasi menurut saya saat ini sangat penting karena dengan zaman saat ini bagaimana segala sesuatunya mengedepankan teknologi informasi termasuk juga dalam implementasi Renstra sehingga tidak hanya berupa kebijakan tertulis yang kita buat tapi juga sudah kita bisa implementasikan dalam teknologi

	informasi misalnya dibuatkan aplikasi untuk penyusunan Renstra sehingga ketika adanya teknologi informasi sangat memudahkan dan juga dapat terecord apa yang sudah kita susun baik Renstra, Renja maupun dan sebagainya jadi menurut saya teknologi informasi itu sangat penting sekali
3	Factor komunikasi yang pertama komunikasi antar personal maupun antar perencana pelaksana dan stakeholder faktor penghambat komunikasi terkadang ketika kita mengadakan sosialisasi ada berapa yang diundang tidak datang itu kesatu yang kedua faktor komunikasi lagi misalnya terkait dengan stakeholder kadang ada kebijakan yang diawal ditetapkan A kemudian ketika sudah kita laksanakan ternyata ada perubahan lagi kebijakan yang lain jadi mungkin menurut saya ada dua hal dari kesadaran masing-masing di internal Kesbangpol sendiri maupun hubungan dengan stakeholdernya ada yang perlu saya tambahkan terkait sistem informasi kelemahannya juga terkadang jaringan internet karena sekarang semua sudah menggunakan internet yang melalui kominfo kadang terjadi jaringan internetnya tidak stabil maka akan menyebabkan juga penghambat bagaimana menyusun Renstra dan implementasinya
4	kemudian menjalin komunikasi berhasil yang pertama terkait teknologi informasi, jika teknologi informasi sudah berjalan baik maka itu akan sangat membantu. Kemudian untuk yang antar personal menjalin komunikasi berhasil menurut saya adalah bagaimana antara pelaksanaan perencana dan stakeholder itu mempunyai kesadaran bersama kemudian kalau memang ada peraturan yang baku yang terakhir adalah kalau memang kalau memang ada sosialisasi maupun pembicaraan bersama agar

	datang supaya segala sesuatu dapat dapat disampaikan dengan baik
--	--

RESPONDEN 3

PERTANYAAN (NO)	HASIL WAWANCARA
A. FAKTOR PROSES 1. Ketajaman Indikator 2. Sumber Daya 3. Komitmen 4. Struktur Birokrasi	
1.a	Kalau saya lihat sih terkait implementasi renstra ini sesuai dengan badan kesbang karena saya lihat dari perencanaannya pelaksanaan sampai dengan penyerapan anggaran kegiatan Kesbangpol ini sudah hampir memenuhi Renstra bakesbangpol untuk 5 tahun ke depan jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan saat ini, dengan kemarin adanya refocusing mempengaruhi tidak karena adanya pandemic kemarin. Kemarin memang ada refocusing di badan Kesbangpol tapi tidak terlalu mempengaruhi karena di Renstra itu ada output kita bisa kita alihkan dengan menggunakan model virtual misalnya ada kegiatan-kegiatan kesbang tidak harus tatap muka karena mungkin dananya memang tidak ada karena refocusing jadi bisalah melalui virtual kita melaksanakan Renstra tersebut, yang penting tujuan pemahaman ke masyarakatnya berjalan dan mencapai
1.b	Terkait untuk ketajaman indikator ini memang masih belum mengena sampai hasil maksimalnya karena ada

	beberapa yang tidak sesuai pelaksanaannya yaitu tidak mencapai target
1.c	Kendalanya ada sebagian yang kurang paham dari SDM tersebut yang tadi saya sampaikan ada yang kurang paham Renstra Sehingga dari awal penyusunan Renja itu tidak sesuai berdasarkan Renstra kita jadi kita harus mengulang-ulang lagi menjelaskan
1.d	Pemahaman pegawai tersebut terhadap Renstra harus ditingkatkan
2.a	Kalo untuk pelaksanaan Sdm-nya ini memang kita tidak bisa maksimal 100% karena kita banyak pegawai Sdm-nya yang kurang memahami prosedur perencanaan tapi ada juga yang memahaminya Jadi itulah karena SDM yang kurang memahami menghambat implementasi Renstra tersebut tetapi tidak semuanya SDM mungkin Sebagian saja.
2.b	Sarannya itu memang kita harus berulang-ulang mau tidak mau kita berikan Bimtek atau memberikan penjelasan secara personal ke masing-masing bidang salah satunya sosialisasi kita ulang-ulang terus supaya mereka lebih paham
3.a	Peran kebijakan pemerintah pusat itu sangat berpengaruh sekali kepada Pemda DKI khususnya kepada implementasi renstra ini kita tidak bisa kita tidak bisa lepas dari pusat, memang harus mengikuti pusat cuman saran saya kepada Kesbangpol ini kadang kita penyusunan program anggaran kita agak lambat kadang kita terlambat lah kadang sedikit terlambat jadinya harus ada pembenahan-pembenahan lagi jika ada kebijakan-kebijakan dari pusat itu keluar setidaknya tidaknya ibener-bener mengacu penyusunan program anggaran sesuai dengan kebijakan pusat

3.b	Solusinya kalau menurut saya bagian-bagian Perencanaan ini dalam mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan jadwal pelaksanaannya jadi jangan misalnya ujug-ujug sistem akan dibuka dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Ternyata kita buka tanggal 1 belum dibuka itu kan jadi salah satu kendala jadi itu perlu perbaikannya di perencanaan jadi tidak sesuai dengan SE, mungkin TI nya harus di tingkatkan
4.a	Terkait dengan struktur birokrasi nya Memang agak lemah dalam pelaksanaan dalam struktur birokrasi sehingga pelaksanaannya Renstra ini kurang maksimal karena birokrasi yang masih kurang paham terhadap renstra ini itulah yang mengakibatkan agak agak kurang sesuai
B. FAKTOR KOMUNIKASI	
1	Kalau saya lihat itu dari perencanaannya karena perencana ada di sekretariat badan Kesbangpol di mana Kami sekretariat ini sudah berkomunikasi dengan pelaksana, komunikasi antar perencana dan pelaksana sudah maksimal namun implementasinya itu memang tidak bisa maksimal sempurna karena memerlukan komitmen dalam pelaksanaan kegiatannya di mana pelaksanaan kegiatan itu kan ada di bidang masing-masing jadi menurut perencanaan kita sudah maksimal menjelaskan kita menunggu hasil pelaksanaan nanti oleh pelaksana kegiatan tersebut
2	Sangat berperan penting sekali karena di jaman sekarang ini kan memang teknologi ini untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan jadi untuk implementasi renstra ini sangat bagus masuk didalam TI tersebut namun kadang di teknik teknologi informasi ini kan kadang kita namanya sistem yang sistem ini kadang kaku tidak seperti kita kalau

	manual kan lebih fleksibel Jadi diharapkan itu walaupun kita ada sistem perlu juga adalah diimbangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan SKPD yang membuat sistem ini seperti contoh misalnya ada pelaksanaan kegiatan yang kita harus melaksanakan disistem lalu sistem harus dilaksanakan dalam waktu 2 hari atau 3 hari Namun ternyata karena lemot atau apa jadinya terhambat tidak bisa mencapai maksimal Jadi mohon bisa diperpanjang kebijakan terkait kendala-kendala teknis tersebut
3	faktor yang menghambat komunikasi ini salah satunya kita kadang memang suka dadakan memang karena situasi kondisi jadi kebijakan yang mendadak harus diselesaikan dalam waktu yang singkat sehingga mengakibatkan kinerja nya kurang maksimal karena terburu-buru itu kalo Menurut saya jadi apa yang diinput di sistem akhirnya tidak tidak maksimal mungkin ada kesalahan-kesalahan Karena terburu-buru kalau pun kadang ada kesalahan kita mau perbaikan sudah tidak ada waktu, tidak ada kebijakan membuka sistem
4	Berhasil itu kalo menurut saya komunikasi dua arah antara perencana dengan pelaksana itu harus ada komunikasinya jadi bisa dapat mencapai hasil yang maksimal serta juga untuk keberhasilan itu juga jangan lupa terkait dengan sistemnya juga perlu internet yang stabil kita perlu dukungan yang bisa menghasilkan yang maksimal

RESPONDEN 4

PERTANYAAN (NO)	HASIL WAWANCARA
A. FAKTOR PROSES	

1. Ketajaman Indikator 2. Sumber Daya 3. Komitmen 4. Struktur Birokrasi	
1.a	Menurut saya dari sisi staf perencanaan implementasi Renstra pada badan kesbang sudah Sesuai yang diharapkan. Apakah ada yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki?? perlu ada yang ditingkatkan mungkin dari sisi sosialisasi Renstra mungkin lebih dipertajam ke bidang-bidang Karena tidak semua bidang sepertinya paham terkait Renstra, jadi cuma orang-orang tertentu saja jadi tidak semuanya orang paham apa itu Renstra.
1.b	Kalau dari sisi perencanaan menurut saya sudah mencerminkan indikatornya itu sudah mencerminkan hasil cuma memang suka ada koreksi dari Bappeda katanya kualitasnya harus ditingkatkan tetapi kita sudah berusaha, memang karena kita non fisik jadi kesulitan menentukan indikator jadi kita ada kesulitan untuk mengukur tapi kita sudah berusaha melalui kuesioner untuk tingkat pemahaman contohnya untuk tingkat pemahaman kita sudah melakukan penyebaran kuesioner melalui pretest dan posttest. Jadi sebelum mengikuti pelaksanaan sosialisasi atau webinar disebar dulu pretest nanti setelah ada pelaksanaannya baru posttest dari situ kita ukur seberapa paham peserta yang mengikuti.
1.c	Kendalanya yang tadi saya Sebutkan tidak semua SDM-nya itu paham jangankan staff pejabat kadang belum paham dia tidak mau peduli dengan Renstra itu mereka tidak paham di bidang itu sebelum mereka menyusun perencanaan mereka tidak mau baca Renstra dulu sehingga kadang ada kegiatan yang mereka mengajukan tidak sesuai antara pengajuan awal rencana awal belanja

	dengan Renstra tidak sinkron, harus pemahaman itu tidak Cuma staff perencana bidang, sekretariat dan wilayah tapi juga termasuk dengan pelaksanaannya.
1.d	Factor yang mendukung keberhasilan mungkin komitmen bersama dari tingkat provinsi sampai tingkat wilayah kita harus komitmen dalam mencapai Renstra, Jadi apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam berita acara itu dijalankan jangan lari dari kesepakatan itu agar komitmen itu bisa berjalan. Menurut Ibu apakah atas kesadaran SDM tersebut atau apakah harus ada reward punishment?? itu memang harus ada perhatian dari pejabat yang di atasnya kadang memang pejabat di atasnya itu kurang perhatian terhadap hal-hal seperti ini jadi mereka tidak ada penekanan kepada staf perencana di wilayah atau di bidang
2.a	Terkait kompetensi SDM nya dari perencanaan sudah baik kita sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi sebenarnya kepada bidang dan 5 Wilayah sudah kita berikan sosialisasi dalam bentuk kita mengadakan rapat sinkronisasi dalam rangka mencapai Renstra cuma memang terkadang masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati.
2.b	Kalo menurut saya sarannya di BPSDM ada Diklat perencanaan pembangunan pembangunan daerah manajemen perencanaan pembangunan daerah itu lingkupnya dibatasi kepada staf perencanaan kualifikasi tiap orang yang mau mengikuti Diklat itu dibatasi seharusnya jangan dibatasi karena kan di bidang maupun di wilayah itu mereka harus paham juga tentang perencanaan Jadi bukan hanya orang perencanaan aja yang harus paham Tapi semua harus paham. Karena kan sebagai pelaksana juga mereka harus paham untuk melakukan itu akhirnya selama ini menseknya bahwa

	Renstra miliknya orang perencanaan padahal itu milik semua
3.a	kalau terkait peran kebijakan pemerintah pusat itu pengaruhnya sangat besar sekali contohnya untuk tahun ini tahun 2020 dengan keluarnya Permendagri 90 sehingga pemerintah daerah harus merubah program dan kegiatan sehingga bukan hanya nomenklatur yang berubah tapi sampai kita harus merubah sistem perencanaan nya sampai harus seperti itu sampai-sampai kita pun harus merubah Renstra, jadi ada perubahan Renstra di tengah pelaksanaan yang 5 tahun ini. Jadi pengaruh dari kebijakan pusat itu sangat berpengaruh karena memang kita harus mendukung kebijakan Pusat
3.b	Solusinya yang harus dilakukan adalah pertama contohnya sistem itu kan kadang berubah-ubah seharusnya sebelum sistem itu dipakai sudah disosialisasikan terlebih dahulu bukan hanya kepada staf perencanaan saja tetapi kepada semua wilayah maupun bidang karena Seperti kebiasaan adalah perencanaan paham tapi wilayah dan bidang tidak paham dari staf perencanaan kita mau memberikan pemahaman sosialisasi kita juga baru kadang jadi tidak maksimal cuma untuk pemahaman diri sendiri harusnya jangan dibatasi untuk staf perencanaan berapa orang kalau pas sosialisasi semua orang saja dilibatkan sehingga pada saat kita mau pakai staf perencanaan tidak perlu lagi menjelaskan ke wilayah atau ke bidang. Mungkin bisa juga diProvinsi itu ada Pusdatin nya jadi terpusat di pusdatin itu karena banyaknya aplikasi-aplikasi yang harus kita jalankan jadi selama ini tumpang tindih dengan staf perencanaan, jadi staf perencanaan itu bebannya terlalu berat harus menjalankan aplikasi yang banyak itu dan juga harus menjalankan proses perencanaan

4.a	Struktur birokrasi itu memang seharusnya pada saat kita mau membuat perencanaan kita telah dibuat tim untuk penyusunan Renstra dibuatlah tim mulai dari kepala Badan, Kepala Bidang, kepala suku badan sama Eselon empat, namun pada kenyataannya yang Menyusun hanya staf perencanaan saja jadi tidak maksimal seharusnya itu bisa kita dapatkan maksimal kalau semua birokrasi terlibat berperan aktif
B. FAKTOR KOMUNIKASI	
1	Kalau dilihat dari stakeholder komunikasi antara Bappeda dan badan kesbang sudah sangat baik setelah kita mendapat arahan dari Bappeda juga dari perencanaan di SKPD kita menyampaikan mengkomunikasikan kepada wilayah dan kepada bidang itu sudah dilakukan dengan baik walaupun masih suka ada salah paham tapi dari perencanaan SKPD itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik
2	Sangat mendukung karena kita karena dalam rangka implementasi renstra ini banyak aplikasi-aplikasi yang harus kita jalankan seperti SIPJM, Smart Planing Budgeting, Monev, KSD banyak yang harus kita jalankan terus ada juga CRM, LPPD, E-sakip benar-benar tugas dari perencanaan sistemnya banyak sekali. Apakah perlu dukungan khusus tenaga IT ?? perlu seharusnya staf perencanaan itu didampingi oleh tenaga IT yang benar-benar paham terkait informasi teknologi karena memang banyak yang harus kita kerjakan jadi pada saat pengerjaan perencanaan penyusunan program waktu deadline ada yang bisa membantu karena biasanya dalam penyusunan anggaran kita terikat oleh deadline waktu yang ditentukan jadi memang benar-benar kerjanya

	harus tepat waktu karena mengikuti SE sesuai dengan arahan dari Bappeda atau TAPD
3	kurangnya tenaga IT penting juga dukungan dari pimpinan yang kadang mereka tidak paham kita sedang mengerjakan apa, harusnya semua paham jadi pada saat pelaksanaan implementasi Renstra berjalan maksimal Jangan hanya staf perencanaan saja yang paham dan staf perencanaan di bidang yang capek sementara pimpinannya tidak tau
4	implementasi ini akan berhasil jika semuanya satu jalan maksudnya komitmennya dijalankan Contohnya seperti kalau memang sudah ditetapkan di dalam berita acara sudah disepakati dalam berita acara seharusnya itu dijalankan jangan contohnya pada saat kita menentukan nama kegiatan sudah disepakati seandainya A tapi ternyata masih ada yang B Itu menyebabkan Komunikasi yang tidak baik agar komunikasi berhasil yaitu komitmen dari semuanya segala pihak.

RESPONDEN 5

PERTANYAAN (NO)	HASIL WAWANCARA
A. FAKTOR PROSES 1. Ketajaman Indikator 2. Sumber Daya 3. Komitmen 4. Struktur Birokrasi	
1.a	Menurut saya sudah sesuai kalau sesuai sudah sesuai kita selalu melaksanakan Renstra itu di tiap tahunnya iya kan permasalahannya malah kadang Renstra itu di antara bidang dengan bagian perencanaan kurang komunikasi jadi masing-masing orang di tiap bidang itu

	belum paham betul Apa itu renstra itu, berarti kurang penyampaian iya atau komunikasi tapi kan kita berusaha untuk tetap melaksanakan Renstra tersebut karena Renstra tersebut itu juga nanti jadi bagian dari kinerja kita
1.b	Karna kita bukan bidang teknis nampaknya agak sulit untuk mengukur ketercapaian kita, maunya kita yang menentukan indikator kita duduk bersama antara perencana dan pelaksana yang tau di lapangan itu pelaksana sedangkan perencana itu merencanakan jadi harusnya duduk bersama sehingga indikatornya bisa kita sepakati bersama dengan perencana internal kesbang. Sedangkan Renstra ini kita ada pembahasan lebih awal dulu di Bappeda Jadi seperti IDI itu kan udah turunan dari kebijakan pusat SDJIS diturunin lalu kalau pemahaman mungkin kalau yang saya tangkap dari sarannya Kayaknya waktu pembahasan kepala badan dengan Bappeda sebaiknya mungkin ada perwakilan Kepala Bidang yang ikut mungkin akan lebih masuk karena kalau dibahas di internal memang sudah jadi draft, karena itu juga Apakah saran kita harusnya draft sarannya itu dari kesbang dulu dari SKPD dulu jangan dibahas di Bappeda udah jadi draft kita harus ngikutin mungkin seperti itu nanti ke depan, itu mungkin kebijakan-kebijakan dari prosedur penyusunan Renstra yang harus lebih diperbaiki.
1.c	Faktor komunikasi antara pelaksana dengan perencana, pelaksanaan ada yang dari Bappeda semua stakeholder terkait
1.d	kita kan bukan Tim teknis yang bisa diukur kerjanya kita memang perlu ada perumusan khusus indikator-indikator untuk menterjemahkan tujuan kita ke dalam ke dalam

	statement-statement indikator, definisi konsep melalui perumusan khusus jadi tidak asal jadi.
2.a	Untuk SDM Rata-rata masih baik hanya saja itu ada rasa perencanaan itu milik perencanaan jadi renstra itu milik perencanaan pelaksanaannya itu sementara di bidang jadi kadang kayak ada Gep Jadi mereka-mereka yang di perencanaan kurang komunikasi dengan yang melaksanakan akhirnya Apa tujuan apa yang diharapkan dari sebuah kegiatan atau program itu tidak tersampaikan. Kalau kompetensinya untuk sisi perencanaan baik dari Bappeda, perencana kesbang atau perencana di bidang menurut bu rahmi kompetensinya sudah memenuhi?? kompetensinya sudah memenuhi asalkan adanya komunikasi pada saat pelaksanaan pembuatan Renstranya, bukan dari sisi SDM melainkan dari sisi komunikasi
2.b	Sarannya perlunya komunikasi antara perencana dan pelaksana karna yang tau di lapangan itu pelaksana sedangkan perencana itu merencanakan jadi harusnya duduk bersama sehingga indikatornya bisa kita sepakati bersama dengan perencana internal kesbang.
3.a	Terkait yang terakhir ini yang permendagri 90 akhirnya kita merubah kegiatan-kegiatan jadi sub kegiatan dan RSK itu berbeda sekali dan pengaruhnya banyak kalau ke kita karena pelaksana dan pertanggungjawabannya itu banyak secara administrasi berubah secara teknis banyak banget yang berubah jadi kebijakan pusat berpengaruh sekali ke kita walaupun sebenarnya tujuan pemerintah pusat itu baik untuk keseragaman dengan provinsi lain se-indonesia Jadi sama tapi lumayan rada berat perubahannya. Karna di kita juga ada IDI jadi ada tugas khusus yang harus dicapai walaupun itu SKPD

	sasarannya Kepala Badan karna nyangkutnya dibidang politik demokrasi jadi ada beban lebih dari bidang lain
3.b	Solusinya itu memang harus ada teguran atau tidak usah teguran tapi sangkutin ke TPP. Biasanya orang lebih peduli kalau udah sangkutannya dengan penghasilan tapi pimpinan juga tidak apa-apa sih kalau mau menegur kalau dia tidak peduli dengan tugasnya bisa bikin Aturan tertulis yaitu ketegasan pimpinan
4.a	kita di bidang itu seringkali bingung dengan kebijakan yang berubah-ubah dan kadang kebijakan itu tidak pernah tidak pernah mewakili kadang tidak mewakili kita perubahan itu tiba-tiba ada kita tidak tahu idealnya itu ditanya di bawah dulu apa kebutuhan kami di bidang baru itu nanti dia dimasukkan ke dalam perencanaan ini kan kita terima jadi apa yang ada dan itu juga sering berubah-ubah membingungkan kebijakannya. Pimpinan harus bisa melihat kebutuhan kita, system birokrasinya masih top-down jadi kita yang dibawah hanya mengikuti.
B. FAKTOR KOMUNIKASI	
1	Seperti yang kita bicarakan di awal tadi ini sebenarnya factor penting bagi renstra antara perencanaan dengan pelaksana di bidang, karena orang dibidang itu sendiri juga banyak yang tidak mau tahu sih sebenarnya tidak tahu tidak tahu atau memang tidak mau tahu, sebaiknya menurut pendapat Ibu kebijakan pimpinan apa yang harus diambil Karena tidak harus orang bidang orang sekretariat juga atau orang Bappeda juga kalau tidak ada apakah perlu reward panismen seperti itu kalo cuma sekedar harus paham harus paham apakah akan sadar dengan sendirinya, sosialisasi penting itu atau mungkin ditulis dicetak lalu ditempel ditempat yang sering kita lihat itu kan jadi kita juga bisa, komitmen sebagai ASN itu memang

	integritasnya harus di tingkatkan kita harus tau tujuan pekerjaan kita itu apa, selama ini yang mengerjakan program saja yang tahu seperti ada penghubung dibidang paling mereka itu yang tau padahal orang bidang tidak hanya penghubung karena pekerjaan kita menuntut untuk itu jadi kita harus mencari tau sementara kalau yang tidak berhubungan kan sudah kalo menurut pendapat bu Rahmi agar semuanya Kayak Kepala Bidang kasubbid, kabid, kepala kasuban, kasubag itu memahami ini sebelum menyusun perencanaan dasar patokannya Renstra itu sebaiknya gimana?? Memang seharusnya tau tapi kenyataannya tidak peduli factor tidak peduli itu yang tidak merasa itu bukan kebutuhan maksudnya bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka jadi ini masalah besar padahal tujuan kita untuk pekerjaan kita itu hasilnya Apa tujuannya Apa itu ada di Renstra. Sarannya sosialisasi di tingkatkan terus komunikasi melalui pamflet dipajang agar tiap hari baca.
2	Sebenarnya dukungan IT ini penting mempermudah kita cuman kadang kala ini kalau pelaksanaannya itu dibatasi waktu Maksudnya saat kita penginputan untuk program atau untuk kegiatan itu waktunya mendadak terus waktunya singkat buru-buru seperti itu sementara sistemnya bagus itu maksudnya memudahkan kita mungkin teknis pelaksanaannya dan kebijakannya belum jadi Kalau waktu yang diberikan untuk menginput waktu yang kita butuhkan untuk perbaikan selalu mendadak dan waktunya terbatas terbatasnya singkat banget, berarti kebijakan pimpinan harus lebih tahu ke pelaksana yang di bawah
3	Sentiment bidang Jadi bidang mengerjakan saja kerjanya yang merasa kalau itu topoksi dia terus juga sekretariat Sibuk saja dengan apa yang menjadi tugas dia

	jadi tidak adanya komunikasi kurang ras memiliki nya terkait kita satu organisasi nih jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri individualis karena komunikasinya kurang
4	Pertama kan kita dapat Renstra pertama sudah jadi baiknya dikumpulin orang disosialisasiin ini Renstra kita untuk 5 tahun ke depan sasarannya apa untuk bidang apa per bidang aja kalau tidak karena ngumpulin orang banyak kan susah bidang ini bidang ini sasarannya ini tujuannya ini indikatornya ini jadi dari awal tahun tuh kita udah pasti apa yang mau kita kerjain di lima tahun kedepan memang nanti orang berganti-ganti itu kayaknya harus di-refresh lagi tiap tahunnya seperti rapat teknis Kan dibilang setiap mau awal ngelaksanain di tiap tahun ada rapat teknis rapat sinkronisasi sebutannya. Tapi itu kan kadang ada kendala kadang ada yang mau mengacu ke situ ada yang tidak itu sentiment masing-masing ada yang mau ikut ada yang tidak.

POLITEKNIK
STIA LAN
 J A K A R T A







POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
Jalan Administrasi II Pejompong, Jakarta Pusat 10260
Telp. (021) 5326396 Fax. (021) 53674562**

RIWAYAT HIDUP PENELITI

1. Nama Peneliti : Lia Ladatul aliyah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : Malang / 05-Maret-1982
4. Alamat Rumah&Telp : Darmawangsa Residence Bekasi (081808566229)
5. Agama : Islam
6. Nama Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta
7. Alamat Instansi dan Telp : Jalan Medan Merdeka No. 8-9 Selatan Gedung
Balaikota Jakarta Pusat
8. Jabatan : Staf Sekretariat
9. Pangkat/golongan : Penata Muda TK.I (III/B)
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SMP : SMPN Bantarkalong Tasikmalaya
 - b. SLTA : SMK-SPMA Tasikmalaya
 - c. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer (STMIK) Cikarang Bekasi

11. Riwayat Pekerjaan :

- a. Guru TIK SMK Yadika 8 Bekasi
- b. Guru TIK SMA Yadika 8 Bekasi
- c. Guru TIK SMK Informatika Amanah Bangsa Bekasi
- d. PT. Indonesia Epson Industri Bekasi



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A